J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia
Vol. 1 No. 1 Maret 2025 Page 146- 153
https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/

Analisis Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya

Erick Tamaela[1], Corvis L. Rantererung[2], Baharuddin[3]

[1)] Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus

Submitted: 27-02-2025 |Review 05-03-2025 | Revision 10-03-2025 | Accepted 13-03-2025

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya dan OPD didalam lingkup Kab Intan Jaya. Teknik analisis data dengan analisis deskriftif kualitatif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, ditentukan oleh beberapa elemen penting akan diulas, termasuk transparansi proses, ketepatan waktu, akurasi laporan, responsivitas pegawai, dan penggunaan teknologi.2) Faktor pendukung dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, dapat diimplementasikan melalui: regulasi yang jelas, pelatihan pegawai, dukungan pimpinan, kolaborasi dengan pihak ketiga dan sistem informasi yang efektif. 3) Faktor penghambat dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya diantaranya: kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, birokrasi yang rumit, keterbatasan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan ketidakpastian ketersediaan barang dan jasa.
.
Kata kunci: Kualitas, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah cara pemerintah untuk berbelanja baik untuk keperluan rumah tangga pemerintah, penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk diserahkan kepada masyarakat (Kuncoro, 2013). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Prasojo dalam Batinggi dan Badu (2019), mengatakan "pelayanan merupakan tanggapan terhadap keperluan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk

[1]E-mail: eriktamaela21@gmail.com
[2]E-mail: corvis_rante@yahoo.com
[3]E-mail: baharuddin@ukipaulus.ac.id

yang mereka inginkan. Layanan Pengadaan Secara Elektronik mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Kepres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang tata cara pelelangan barang dan jasa. Kepres ini mengalami transisi perubahan kepada Kepres baru No. 54 Tahun 2010 yang memuat tentang tata cara pelelangan barang dan pengadaan barang dan jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik (E-procurement). Pelaksanan e-procurement merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah

Sesuai dengan hasil observasi peneliti pada obyek penelitian ini, peneliti memperoleh informasi bahwa untuk proses lelang sendiri sudah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE dilingkup Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya, namun dalam proses LPSE sampai sekarang terkadang masih terkendala pada Pihak Penyedia Jasa/Barang ataupun pada Pihak anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masih saja ada peserta lelang yang kurang mengenal ataupun mahir dalam menggunakan aplikasi tersebut, selanjutnya lambatnya pemberian respon atau jawaban terhadap pertanyaan dalam layanan tanya jawab LPSE dan masih terdapat penyedia barang/jasa yang memenangkan beberapa proyek sekaligus.

Tinjauan Literatur

Penelitian terkait pengadaan barang dan jasa, sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya oleh Faza Rahmania (2024) yang meneliti tentang Analisis Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Menggunakan Metode E-Procurement. Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1, No.4 Maret 2024 e-ISSN: 3025-5694;p-ISSN:3025-5708,Hal.77-83. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa e-procurement memiliki banyak manfaat dan perbandingan yang lebih baik dengan pengadaan bersifat konvensional yang mana dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kinerja E-Procurement yang memiliki manfaat yaitu, efektif, efisien, transparan, akuntabel serta dapat mendukung proses monitoring. Untuk menganalisis Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya menggunakan Aplikasi Sirup Versi 4 dan Aplikasi SPSE 4.5; untuk menganalisis menjadi faktor pendukung Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya; dan untuk menganalisis faktor penghambat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Kajian Teori yang Relevan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang dan jasa turut dilaksanakan menggunakan teknologi informasi sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik didukung oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik tentunya turut serta dituntut untuk selalu meningkatkan kualias pelayanan, kualitas pelayanan sendiri merupakan suatu penawaran dari bagian yang disebut dengan jasa yang pada dasarnya

tidak bisa dijelaskan tapi tentunya sangat mudah dirasakan. Peningkatan pelayanan menjadi tolak ukur kredibilitas pemerintahan, maka dari itu memang seharusnya dan sangat diperlukan penilaian lanjutan seperti pengawasan serta evaluasi dalam setiap pemberian layanan untuk mencapai standar kualitas yang memang seharusnya diperhatikan dan diterapkan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini relevan dengan Kualitas Pelayanan Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor pendorong Kualitas Pelayanan Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kantor Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu, kemudahan dalam segi pelayanan, keramahan yang diberikan petugas pelayanan, dan kepedulian yang diberikan petugas terhadap pengguna layanan. Faktor penghambat Kualitas Pelayanan Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kantor Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu, fasilitas pendukung layanan masih belum lengkap, jumlah tim petugas LPSE yang kurang dalam pemberian pelayanan mempengaruhi kecepatan, masih adanya error atau serta gangguan pada akses pendukung pelayanan, dan juga kesesuaian dalam standar operasional LPSE. Kemudian penelitian ini menyanrankan bahwa Pengguna layanan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik hendaknya lebih memperhatikan waktu terhadap permintaan yang ditujukan pada petugas pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik, hendaknya mengajukan permintaan pada jam kerja, jangan dilakukan pada malam hari sehingga permintaan-permintaan tersebut tidak luput dari petugas pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pengguna yang memerlukan pelayanan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik hendaknya agar dapat datang langsung ke kantor agar lebih jelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya. Sumber data dari data primer dengan wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perencanaan. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya dan OPD dalam Lingkup Kabupaten Intan Jaya. Teknik analisis data dengan analisis deskriftif kualitatif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya menunjukkan bahwa kualitas layanan pengadaan barang dan jasa menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas tersebut, yang perlu ditangani secara komprehensif. Salah satu temuan utama dari observasi adalah kurangnya pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang pengadaan. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan pegawai untuk melaksanakan prosedur pengadaan secara efektif. Tanpa pengetahuan yang cukup, pegawai cenderung melakukan kesalahan dalam pelaporan, mengalami keterlambatan dalam proses, dan membuat keputusan yang kurang tepat (Randan et al., 2025; Sanggalangi et al., 2025).

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Sekretariat Daerah untuk mengembangkan program pelatihan yang terfokus pada peningkatan kompetensi pegawai dalam pengadaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik (Bandhaso et al., 2023; Mangallo et al., 2025). Observasi juga menunjukkan bahwa proses pengadaan yang melibatkan banyak tahapan dan persyaratan administratif menciptakan birokrasi yang rumit. Pegawai harus melewati banyak langkah yang panjang dan kompleks, yang menghambat kecepatan dan efisiensi pengadaan. Birokrasi yang berlebihan ini dapat menyebabkan frustrasi di kalangan pegawai, membuat mereka merasa kurang berdaya dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur pengadaan sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, sehingga pegawai dapat lebih cepat dan mudah dalam melakukan pengadaan.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kualitas layanan. Dalam situasi di mana anggaran tidak memadai, Sekretariat Daerah sering kali terpaksa memilih opsi yang lebih murah, yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas barang dan jasa yang diperoleh. Hal ini berpotensi mengganggu kelancaran operasional dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih baik dan realistis untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup bagi pengadaan.Fenomena kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi pegawai juga berkontribusi pada rendahnya kualitas layanan pengadaan. Tanpa pelatihan yang memadai, pegawai tidak dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi dan praktik terbaik dalam pengadaan. Kesenjangan pengetahuan ini dapat menghambat kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan agar pegawai selalu diperbarui dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru.Ketidakpastian mengenai ketersediaan barang dan jasa di pasar menjadi tantangan tambahan yang memperburuk kondisi pengadaan. Fluktuasi harga dan ketersediaan barang dapat mempersulit perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, sehingga pegawai sering kali terjebak dalam situasi di mana mereka harus mencari alternatif dalam waktu singkat. Hal ini berisiko menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik untuk mitigasi risiko, termasuk menjalin hubungan yang baik dengan beberapa penyedia untuk memastikan keberagaman sumber dan ketersediaan barang.

Kualitas layanan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Untuk meningkatkan kualitas layanan, perlu dilakukan upaya terintegrasi yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, alokasi anggaran yang memadai, pelatihan berkelanjutan, dan strategi untuk menghadapi ketidakpastian ketersediaan barang dan jasa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, serta memenuhi harapan masyarakat.

Pembahasan

Kualitas layanan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya merupakan aspek krusial yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pengadaan yang baik tidak hanya mendukung kelancaran operasional pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Dalam pembahasan ini, beberapa

elemen penting akan diulas, termasuk transparansi proses, ketepatan waktu, akurasi laporan, responsivitas pegawai, dan penggunaan teknologi.

1. Transparansi Proses

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam pengadaan barang dan jasa yang baik. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, kualitas layanan pengadaan barang dan jasa dinilai cukup baik dalam hal transparansi. Prosedur pengadaan yang jelas dan dapat diakses oleh publik menjadi salah satu faktor yang mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah. Adanya pengumuman yang terbuka mengenai proses lelang dan kriteria pemilihan penyedia barang dan jasa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk lebih meningkatkan transparansi, perlu ada lebih banyak komunikasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hasil pengadaan dan evaluasi kinerja penyedia.

2. Ketepatan Waktu

Meskipun terdapat aspek positif dalam transparansi layanan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Intan Jaya, praktik pengadaan sering kali diwarnai oleh keterlambatan dalam pengiriman barang dan jasa. Keterlambatan ini menjadi masalah serius yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan pengguna serta efektivitas program-program yang sangat bergantung pada ketersediaan barang dan jasa tersebut. Dalam konteks pemerintahan, di mana ketepatan waktu merupakan faktor kunci untuk menjaga kelancaran operasional, keterlambatan pengiriman dapat menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam pengadaaan tidak hanya berdampak pada jadwal kerja pegawai dan proyek yang sedang berjalan, tetapi juga dapat menyebabkan implikasi finansial yang signifikan. Anggaran yang telah dialokasikan untuk suatu program bisa terbuang sia-sia jika barang dan jasa yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan proyek dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap penyebab keterlambatan ini. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan, seperti masalah logistik, proses administrasi yang berbelit-belit, atau kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, perlu dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyebabnya, Sekretariat Daerah dapat mencari dan menerapkan solusi yang tepat untuk mempercepat proses pengadaan. Langkah-langkah seperti peningkatan komunikasi dengan penyedia, penyederhanaan prosedur pengadaan, atau penggunaan teknologi informasi yang lebih efisien dapat membantu dalam mengatasi masalah keterlambatan ini.

3. Akurasi Laporan

Kualitas laporan pengadaan yang dihasilkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya sering kali menghadapi masalah ketidakakuratan. Ketidakakuratan ini dapat berakibat serius, menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Laporan yang tidak tepat dapat menyebabkan pemahaman yang salah mengenai kebutuhan barang dan jasa yang sebenarnya, yang pada gilirannya dapat mengganggu perencanaan anggaran daerah dan alokasi sumber daya yang efisien.

Ketidakakuratan dalam laporan pengadaan tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada pelayanan publik secara keseluruhan (Paembonan et al., 2024; Sanggalangi et al., 2025). Misalnya, jika laporan menunjukkan kebutuhan yang salah, anggaran yang dialokasikan mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya, atau sebaliknya, dapat menyebabkan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi pegawai di

Sekretariat Daerah untuk memiliki pemahaman yang baik tentang standar akuntansi dan prosedur pelaporan yang berlaku. Untuk mengatasi masalah ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai di bidang akuntansi dan pelaporan sangat diperlukan. Program pelatihan dapat mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntansi dasar, cara penyusunan laporan yang akurat, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaporan. Dengan memberikan pegawai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, diharapkan akurasi laporan pengadaan dapat meningkat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan anggaran yang lebih efisien.

4. Responsivitas Pegawai

Responsivitas pegawai di Sekretariat Daerah dalam mengatasi pertanyaan dan keluhan dari pengguna layanan dapat dianggap baik. Pegawai menunjukkan kesiapan untuk memberikan informasi dan menjawab masalah yang dihadapi pengguna. Namun, meskipun responsivitas sudah ada, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Meningkatkan komunikasi yang lebih proaktif dan memberikan informasi yang lebih cepat dan jelas kepada pengguna dapat meningkatkan kepuasan layanan. Selain itu, mekanisme pengaduan yang lebih efektif juga perlu dipertimbangkan agar pengguna merasa didengar dan ditangani.

5. Penggunaan Teknologi

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya mulai menunjukkan dampak positif. SIPD membantu dalam pengelolaan data dan informasi pengadaan dengan lebih efisien. Namun, masih ada tantangan dalam adopsi dan pemanfaatan penuh sistem tersebut. Beberapa pegawai mungkin belum sepenuhnya memahami cara menggunakan SIPD secara optimal, yang dapat menghambat proses pengadaan. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai penggunaan teknologi ini sangat penting agar semua pegawai dapat memanfaatkannya dengan baik.

Kualitas layanan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya memiliki beberapa aspek yang positif, seperti transparansi dan responsivitas pegawai, namun juga menghadapi tantangan, termasuk ketepatan waktu, akurasi laporan, dan variabilitas kepuasan pengguna.

KESIMPULAN

1. Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya dalam penggunaan Aplikasi Sirup Versi 4.0 dan Aplikasi SPSE 4.5, ditentukan oleh beberapa elemen penting akan diulas, termasuk transparansi proses, ketepatan waktu, akurasi laporan, responsivitas pegawai, dan penggunaan teknologi.
2. Faktor pendukung dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, dapat diimplementasikan melalui: regulasi yang jelas, pelatihan pegawai, dukungan pimpinan, kolaborasi dengan pihak ketiga dan sistem informasi yang efektif.
3. Faktor penghambat dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya diantaranya: kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, birokrasi yang rumit, keterbatasan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan ketidakpastian ketersediaan barang dan jasa.

Daftar Pustaka

Agus, S., & Kuncoro, A. W. (2019). Pengaruh Brand Ambassador terhadap Keputusan Pembelian.Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 8(1).

Badan Standarisasi Nasional. Sistem Manajemen Mutu–Persyaratan ISO 9001:2015.

Bandhaso, M. L., Tandiredung, J., Palungan, E., & Sasabone, L. (2023). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Cipta Sejati Revolution Makassar. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business ReviewJournal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *1*(1), 35–41. https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/157

Batinggi dan Badu Ahmad, 2019, Manajemen Pelayanan Publik, Yogyakarta, CV Andi Ofset

Creswell, J. W. (2019). Reseach Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Faza Rahmania (2024) yang meneliti tentang Analisis Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Menggunakan Metode E-Procurement. Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1, No.4 Maret 2024 e-ISSN: 3025-5694;p-ISSN:3025-5708,Hal.77-83.DOI: https://doi.org/10.61722/jirs.v1i4.887

Heizer, J., and Render, B. (2019). Operations Management. 10th Edition. Pearson Education, Inc. New Jersey.

ISO 9001: 2015: A Complete Guide to QualityManagement Systems. New York: CRC Press.

P Lupiyoadi,R. (2019). Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta : Salemba Empat.

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 108–115. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengadaan barang dan Jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana / Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 101–107. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/864/712

Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 86–92. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix. Method. Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.